

RINGKASAN

Zaki Anwar
207410102004

Penerbitan Hasil *Asesmen* Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika Sebagai Syarat Rehabilitasi (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Idi dan Pengadilan Negeri Bireuen)

(Dr. Faisal, S.Ag., S.H.,M.Hum dan Dr. Hamdani, S.H., LL.M).

Penyalahgunaan narkotika terdapat tiga kriteria berdasarkan Undang Undang Narkotika yaitu pecandu, korban penyalahguna narkotika, dan penyalahguna yang berperan sebagai (penjual, produsen dan kurir narkotika). Pasal 54 Undang Undang Narkotika menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi untuk terdakwa penyalahgunaan narkotika baru dapat dilakukan jika sudah adanya assesmen dari tim assessmen terpadu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis dasar pertimbangan penyidik penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dalam meminta dilakukan *asesmen* bagi terdakwa penyalahguna narkotika kepada Tim *Asesmen* Terpadu, dan untuk menganalisis prosedur dan kendala Tim *Asesmen* Terpadu dalam melakukan penerbitan hasil *asesmen* bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika.

Metode penelitian yang digunakan yaitu Jenis penelitian ini yuridis empiris, dengan pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan, Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian yang pertama didapatkan penyidik Polri dan penyidik BNNK dalam meminta asesmen terhadap tersangka penyalahguna narkotika memiliki beberapa pertimbangan yaitu 1. Pertimbangan penyidik bahwa tersangka yang tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan narkotika dan ketika dilakukan test urine terbukti positif menggunakan narkotika, 2. Pertimbangan penyidik sesuai hasil penyelidikan bahwa tersangka tidak terlibat peredaran gelap narkotika, 3. Pertimbangan penyidik bahwa tersangka bukan merupakan residivis narkotika, dan 4. Pertimbangan penyidik bahwa barang bukti yang ditemukan pada proses tangkap tangan tidak melebihi ketentuan Surat Edaran Nomor SE/01/II/2018/Bareskrim Angka 2 huruf c. Hasil penelitian yang kedua terkait prosedur tim asesmen terpadu dalam melakukan penerbitan hasil asesmen adalah harus adanya permohonan penyidik BNNK atau Penyidik Kepolisian terkait permintaan dilakukannya asesmen, selanjutnya kendala yang dihadapi oleh tim asesmen dalam melakukan penerbitan hasil asesmen yaitu 1. Kendala yang berasal dari tersangka penyalahgunaan narkotika, 2. Kendala dari kekurangan dana untuk dapat dilakukannya *asesmen*, 3. Keterbatasan tempat rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

Disarankan agar penyidik juga mempertimbangkan asesmen terhadap tersangka yang tidak tertangkap tangan namun hasil test urin positif menggunakan narkotika. Disarankan kepada pemerintah agar menambah dana pelaksanaan asesmen untuk tim asesment terpadu dan menambah tempat rehabilitasi.

Kata Kunci: Narkotika, *Asesmen*, Rehabilitasi

SUMMARY

Zaki Anwar Issuance of Assessment Results for Narcotics Abuse
207410102004 Defendants as Requirements for Rehabilitation (Comparative
Study of Idi District Court and Bireuen District Court)

(Dr. Faisal, S.Ag., S.H.,M.Hum and Dr. Hamdani, S.H., LL.M).

Narcotics abuse has three criteria based on the Narcotics Law, namely addicts, victims of narcotics abuse, and abusers who act as (narcotics sellers, producers and couriers). Article 54 of the Narcotics Law states that narcotics addicts and victims of narcotics abuse must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. Rehabilitation for suspects of narcotics abuse can only be carried out if there has been an assessment from an integrated assessment team.

The purpose of this study was to see and analyze the basic considerations of investigators from the Indonesian National Police (Polri) and the District National Narcotics Agency (BNNK) in requesting an assessment for drug abuse suspects to the Integrated Assessment Team, and to analyze the procedures and constraints of the Integrated Assessment Team in carrying out issuance of assessment results for Narcotics Abuse Defendants.

The research method used is this type of research is empirical juridical, with a case approach and an empirical approach. There are two sources of data in this study, namely primary data and secondary data.

The results of the first study were obtained by Polri investigators and BNNK investigators in requesting an assessment for suspected narcotics abusers having several considerations, namely 1. The investigator's considerations that the suspect who was caught in the act of abusing narcotics and when a urine test was carried out proved positive for using narcotics, 2. The investigator's considerations were in accordance with the results investigation that the suspect was not involved in the illicit trafficking of narcotics, 3. The investigator's consideration that the suspect was not a narcotics recidivist, and 4. The investigator's consideration that the evidence found during the hand-catching process did not exceed the provisions of Circular Letter Number SE/01/II/2018/Bareskrim Angka 2 letters c. The second research result related to the procedures of the integrated assessment team in publishing the results of the assessment is that there must be a request from BNNK investigators or Police Investigators regarding the request for an assessment, then the obstacles faced by the assessment team in issuing the results of the assessment are 1. Constraints originating from suspects of narcotics abuse , 2. Constraints from a lack of funds to be able to carry out an assessment, 3. Limited narcotics abuse rehabilitation places.

It is recommended that investigators also consider the assessment of suspects who are not caught red-handed but have positive urine test results for using narcotics. It is suggested to the government to increase the fund for the integrated assessment team and add rehabilitation places.

Keywords: Narcotics, Assessment, Rehabilitation